

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal administrasi dan manajemen organisasi pemerintahan. Di era globalisasi ini, kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, dan akurat sangatlah penting, terutama bagi organisasi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas-tugas negara. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi telah menjadi solusi penting dalam mengoptimalkan proses kerja dan meningkatkan efisiensi kinerja birokrasi.

Di Provinsi Sulawesi Barat, Biro Umum memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan. Sebagai unit yang bertanggung jawab atas layanan administrasi, pengelolaan perjalanan dinas, serta pengelolaan aset dan dokumen, dan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan Biro Umum memiliki masalah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional dan sebelumnya belum ada sistem aplikasi yang dapat menunjang pengelolaan perjalanan dinas, serta pengelolaan aset dan dokumen. Salah satu strategi yang diterapkan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan mengimplementasikan sistem informasi terintegrasi, seperti Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dan Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SIPADA).

Penelitian mengenai penerapan sistem informasi ini menjadi penting karena dapat mengidentifikasi dampak dari digitalisasi dan automasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi. Dengan sistem yang terintegrasi, diharapkan proses pengelolaan data dan dokumen menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien, sehingga mendukung kinerja pemerintahan yang lebih responsif dan transparan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait optimalisasi penggunaan sistem, serta mengukur efektivitasnya dalam membantu tugas sehari-hari di Biro Umum.

SRIKANDI merupakan sistem yang dirancang untuk mengelola dokumen dan arsip secara elektronik sehingga proses pengarsipan menjadi lebih efisien, cepat, dan terstandar. Dengan adanya SRIKANDI, alur dokumen dapat terpantau dengan lebih baik, meminimalisir kehilangan atau keterlambatan dalam pengelolaan arsip, serta memudahkan proses pencarian dokumen secara digital. Hal ini sangat penting bagi Biro Umum, mengingat volume dokumen yang dikelola sangat besar dan memiliki peranan strategis dalam mendukung kelancaran administrasi pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat.

Di sisi lain, SIPADA hadir untuk mempermudah pengelolaan perjalanan dinas pegawai. Sebagai sistem yang mengintegrasikan proses pengajuan, verifikasi, hingga pelaporan perjalanan dinas, SIPADA tidak hanya mengurangi kerumitan administratif, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran perjalanan

dinas. Penggunaan SIPADA memberikan dampak positif dalam hal waktu pemrosesan yang lebih cepat, mengurangi tumpang tindih data, serta memastikan bahwa perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan SIPADA, setiap tahapan perjalanan dinas dapat dimonitor dengan jelas, mulai dari pengajuan hingga pelaporan, sehingga meminimalkan potensi kesalahan dan penyalahgunaan anggaran.

Penerapan kedua sistem informasi ini di Biro Umum SETDA Provinsi Sulawesi Barat merupakan langkah strategis dalam menjawab tuntutan modernisasi administrasi. Sistem informasi terintegrasi seperti SRIKANDI dan SIPADA tidak hanya berdampak pada peningkatan efisiensi operasional, tetapi juga mendorong kinerja yang lebih baik dari segi produktivitas dan kualitas layanan. Peningkatan kinerja ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengimplementasikan good governance dan e-government, di mana transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi menjadi prinsip-prinsip utama yang harus diwujudkan.

Namun, seperti halnya setiap penerapan teknologi baru, integrasi SRIKANDI dan SIPADA dalam operasional Biro Umum juga tidak terlepas dari berbagai tantangan. Faktor seperti kesiapan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur teknologi yang memadai, serta adaptasi terhadap perubahan alur kerja tradisional menjadi isu penting yang harus diatasi. Meskipun demikian, dengan adanya pelatihan dan sosialisasi yang tepat, serta dukungan dari seluruh elemen organisasi, sistem ini diyakini dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keseluruhan Biro Umum.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengkaji sejauh mana dampak penerapan SRIKANDI dan SIPADA terhadap kinerja di Biro Umum SETDA Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai perubahan yang terjadi, baik dari sisi efisiensi, efektivitas, maupun kepuasan pengguna terhadap layanan yang diberikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan lebih lanjut dari kedua sistem informasi tersebut, serta menjadi model bagi penerapan sistem serupa di lingkungan pemerintahan lainnya di Indonesia.

Dengan demikian, penerapan SRIKANDI dan SIPADA diharapkan tidak hanya menjadi inovasi teknologi semata, tetapi juga sebagai pilar penting dalam mendorong terciptanya birokrasi yang lebih modern, responsif, dan akuntabel. Ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan bahwa setiap proses administrasi berjalan dengan efisien dan efektif, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Sulawesi Barat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) terhadap efisiensi pengelolaan arsip di Biro Umum SETDA Provinsi Sulawesi Barat?

2. Sejauh mana penerapan Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SIPADA) mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan perjalanan dinas di Biro Umum SETDA Provinsi Sulawesi Barat?
3. Apakah penerapan SRIKANDI dan SIPADA berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai di Biro Umum SETDA Provinsi Sulawesi Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) terhadap kinerja pegawai di Biro Umum SETDA Provinsi Sulawesi Barat.
2. Menganalisis pengaruh penerapan Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SIPADA) terhadap kinerja pegawai di Biro Umum SETDA Provinsi Sulawesi Barat.

3. Mengukur sejauh mana penerapan SRIKANDI dan SIPADA berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pegawai di Biro Umum SETDA Provinsi Sulawesi Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Kontribusi bagi pengembangan literatur dalam bidang manajemen dan teknologi informasi: Penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai penerapan sistem informasi di lingkungan birokrasi pemerintahan, khususnya terkait dampaknya terhadap kinerja organisasi.
- b. Menambah pemahaman tentang efektivitas sistem informasi terintegrasi: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman teoritis yang lebih mendalam mengenai efektivitas penggunaan sistem informasi terintegrasi, seperti SRIKANDI dan SIPADA, dalam mendukung pengelolaan administrasi dan perjalanan dinas.

- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya: Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji topik terkait penerapan sistem informasi di lingkungan pemerintahan atau sektor lainnya.
- d. Pengembangan teori kinerja organisasi: Penelitian ini dapat memperluas teori terkait peningkatan kinerja organisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam konteks birokrasi pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional di Biro

Umum:

Temuan dari penelitian ini dapat digunakan oleh Biro Umum SETDA Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan arsip dan perjalanan dinas melalui optimalisasi SRIKANDI dan SIPADA.

b. Rekomendasi bagi kebijakan pengelolaan sistem informasi

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan terkait penerapan sistem informasi terintegrasi di berbagai instansi untuk mendukung good governance dan e-government.

c. Perbaikan proses adaptasi SDM terhadap teknologi baru:

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis mengenai cara terbaik untuk meningkatkan penerimaan dan adaptasi SDM dalam menggunakan teknologi informasi di lingkungan birokrasi.

d. Optimasi anggaran dan waktu perjalanan dinas:

Dengan adanya hasil evaluasi terhadap SIPADA, penelitian ini dapat memberikan solusi praktis bagi pengelolaan perjalanan dinas yang lebih transparan, hemat waktu, dan anggaran di Biro Umum SETDA Provinsi Sulawesi Barat.

e. Model implementasi sistem informasi di pemerintahan:

Penelitian ini dapat memberikan contoh yang jelas mengenai bagaimana sistem informasi terintegrasi dapat diterapkan di lingkungan pemerintahan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi, serta dapat diadopsi oleh instansi lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap isi dari penelitian ini, maka penulisan ini dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan,

Berisi bagaimana latar belakang masalah yang terjadi sehingga diangkat menjadi objek penelitian. Dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka,

Membahas tentang landasan teori yang mendukung perumusan hipotesis dalam menganalisis hasil penelitian - penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis sebagai pernyataan akurat yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

Bab III Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian,

Bab ini menguraikan hipotesis penelitian yang dibangun berdasarkan landasan kerangka konseptual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi, orang, dan prosedur yang ditujukan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di suatu organisasi. Menurut O'Brien dan Marakas (2010), sistem informasi dapat didefinisikan sebagai "sebuah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu". Sistem ini tidak hanya berperan sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas operasional organisasi.

Dalam konteks organisasi pemerintah, penerapan sistem informasi terintegrasi dapat mengurangi ketergantungan pada sistem manual yang lambat, meningkatkan akurasi data, dan mempercepat alur kerja administrasi. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, berbagai fungsi organisasi dapat saling berhubungan dan bekerja secara lebih efisien.

Dalam pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat sendiri Sistem Informasi sangat diperlukan karena:

- a. Jarak antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membutuhkan waktu tempuh yang cukup lama

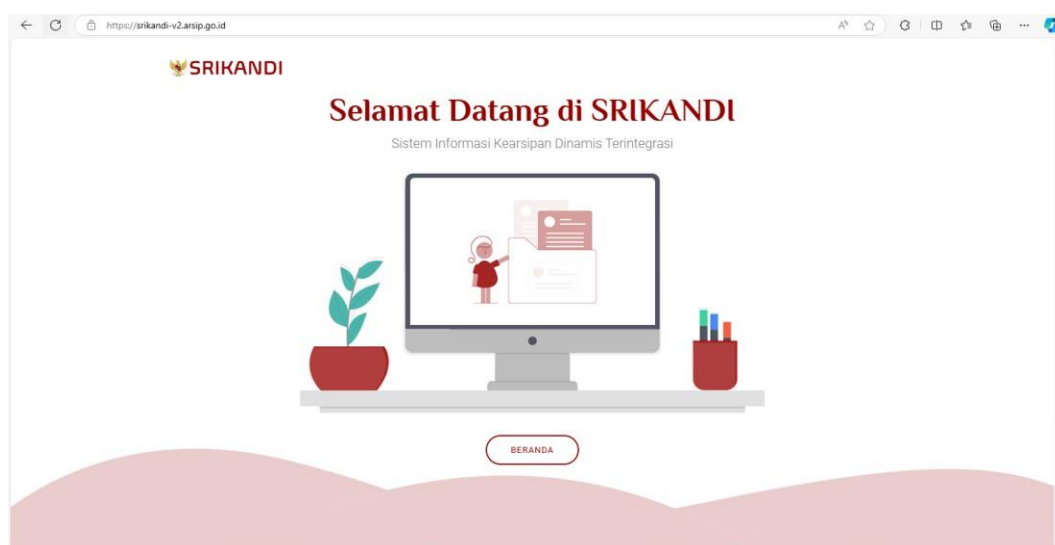
- b. Laporan dan data yang saling terkait tentunya memudahkan dalam penyusunan dan pengecekan dalam proses perekaman data antara perangkat daerah
- c. Dalam kepentingan surat menyurat yang berjenjang Lebih cepat dan akurat
- d. Bisa diakses dimana saja dan kapan saja
- e. Untuk rekam data dan jejak data lebih mudah untuk dicari dan ditelusuri
- f. Mengurangi biaya untuk penggunaan Alat Tulis Kantor
- g. Dengan kelebihan ini pimpinan OPD tidak perlu membuang waktu dan energi dalam membuat keputusan karena cukup membuka system langsung bisa menganalisa dan tentunya bisa langsung melakukan Langkah dan proses untuk keperluan administrasi dan pelaporan dan tentunya bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Selain pertukaran informasi yang lebih cepat pembaharuan dan jika ada kesalahan dan ketidak sesuain data bisa dilakukan revisi dan data akan tersambung dengan pusat data,jika data dalam pemerintahan tidak terintegrasi kemungkinan akan terjadi tumpang tindih dalam persuratan dan data laporan.

2.2. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)

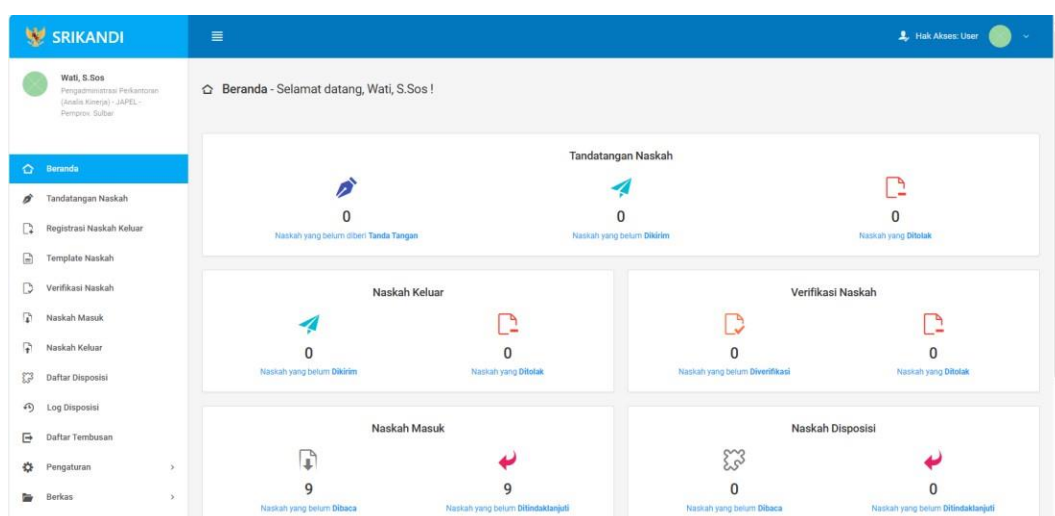
SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) adalah sebuah sistem yang dikembangkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang bertujuan untuk mengelola arsip secara elektronik

di seluruh instansi pemerintah. Menurut **Arsip Nasional Republik Indonesia (2020)**, SRIKANDI merupakan sistem yang memungkinkan pengelolaan arsip dari penciptaan, distribusi, penggunaan, penyimpanan, hingga pemusnahan arsip dalam format digital.

Berikut tampilan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi(SRIKANDI).



Gambar 2.1 Halaman Login Aplikasi Srikandi



Gambar 2.2 Halaman Utama Aplikasi Srikandi

Penerapan SRIKANDI di pemerintahan memberikan beberapa keuntungan, antara lain:

- a. Mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik.
- b. Meningkatkan kecepatan dalam pencarian dan pengelolaan arsip.
- c. Meningkatkan keamanan dan akurasi dalam pengelolaan arsip.
- d. Mendorong terwujudnya good governance dan transparansi dalam pengelolaan arsip negara.

Aplikasi Srikandi adalah Aplikasi yang digunakan dalam persuratan yang mempunyai lingkup Perangkat Daerah Baik Kabupaten /Kota dan Provinsi dan Juga instansi Kementerian Indonesia.

Adapun layanan aplikasi Srikandi diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan surat antara lain:

- a. Menerima naskah dinas masuk dan dalam melakukan registrasi naskah masuk
- b. Disposisi dan tindak lanjut naskah dinas
- c. Menciptakan naskah dinas dengan registrasi naskah keluar
- d. Memberikan tanda tangan elektronik pada setiap naskah dinas
- e. Mengirim naskah dinas

Tipe pengguna akun dan hak akses srikandi:

- a. Admin Nasional.

Posisi Admin Nasional dalam Aplikasi Srikandi berada di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

b. Admin Instansi.

Admin Instansi berada pada unit kearsipan atau unit pusat data dan informasi(pusdatin)Posisi Admin Nasional dalam Aplikasi Srikandi Berada di Arsip Nasional Republik

c. Unit kerarsipan.

Admin unit kearsipan berada pada level pimpinan unit kearsipan

d. Tata Usaha/Sekretaris

e. Pengguna /User

Setelah terlebih dahulu mengakses aplikasi Srikandi akan muncul beberapa tampilan menu untuk pengguna user Srikandi Antara lain :

- Naskah yang belum diberi tanda tangan
- Naskah yang belum dikirim
- Naskah tanda tangan yang ditolak
- Naskah yang belum diverifikasi
- Naskah verifikasi yang ditolak
- Naskah masuk yang belum dibaca
- Naskah masuk yang belum ditindak lanjuti
- Disposisi yang belum dibaca
- Disposisi yang belum ditindak lanjuti
- Disposi yang belum dibaca
- Disposisi yang belum ditindaklanjuti
- Tembusan yang belum dibaca

Adapun Pengaturan penomoran naskah dinas:

- Penomoran naskah dinas harus mengikuti tata naskah dinas instansi masing-masing
- Penomoran naskah pada aplikasi Srikandi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara :a) penomoran manual b) penomoran otomatis
- Pengaturan penomoran naskah otomatis hanya dapat dilakukan oleh akun Sekretaris (kepala biro dan sekretariat) atau masing-masing unit pengolah
- Jika ingin melakukan registrasi naskah keluar yang diatndatangi tanggal mundur maka harus mengetik manual tanggal naskah dinas (tidak menggunakan parameter penomoran otomatis)
- Nomor peraturan dan keputusan diberikan oleh sub bagian tata usaha pimpinan yang diadministrasikan oleh sekretaris ketua
- Nomor peraturan ,keputusan surat edaran dan instruksi sekretaris jenderal diberikan oleh subbagian tata usaha kesetjenan yang diadministrasikan oleh sekretaris sesjen
- Pemberian nomor naskah dinas eksternal undangan eksternal nota dinas memorandum diberikan oleh subbagian tata usaha kesetjenan yang diadministrasikan oleh sekretaris masing masing kepala biro atau sekretariat
- pemberian nomor surat tugas ,surat pernyataan rekomendasi memorandum rekomendasi surat dinas eksternal dan undangan eksternal yang diatndatangi oleh ketua,anggota dan sekretaris

jenderal diberikan oleh sekretaris kepala biro yang berhubungan dengan subtasnsi surat dengan berkoordinasi dengan sub bagian tata usaha kesetjenan

- parameter yang digunakan dalam penomoran otomatis adalah (N):Nomor Surat,(K):klasifikasi arsip(V1)unit kerja /UP,(M)Bulan ,dan (Y) tahun.

Beberapa tujuan dalam pengembangan dan pemanfaatan aplikasi Srikandi dan Sipada yang dirasakan lewat sistem integrasi informasi bagi pemerintah Sulawesi barat sendiri bisa dicatat antara lain :

1. Hubungan antara pemerintah Pusat dan Daerah,lintas OPD Prokofimda dan masyarakat semakin baik membuat kita tidak lagi mengulang proses seperti perbedaan data format surat dan bisa menekan resiko melakukan kesalahan dalam mengolah data, dengan menekan semua resiko kesalahan berulang pekerjaan akan berjalan mulus dan lebih cepat selesai.
2. Memudahkan akses data secara real time,ketika suatu kegiatan akan dilaksanakan dan membutuhkan persyaratan lampiran surat ijin dll diperlukan untuk tindakan cepat sementara pimpinan dan pejabat yang bersangkutan tidak ada ditempat dan sedang melakukann perjalanan untuk urusan dinas dan ketika situasi tersebut berulang akan membuat suatu pekerjaan terhambat belum lagi perbedaan tanggal yang perlu disesuaikan sebelum kegiatan tersebut berlangsung dengan sistem yang terintegrasi

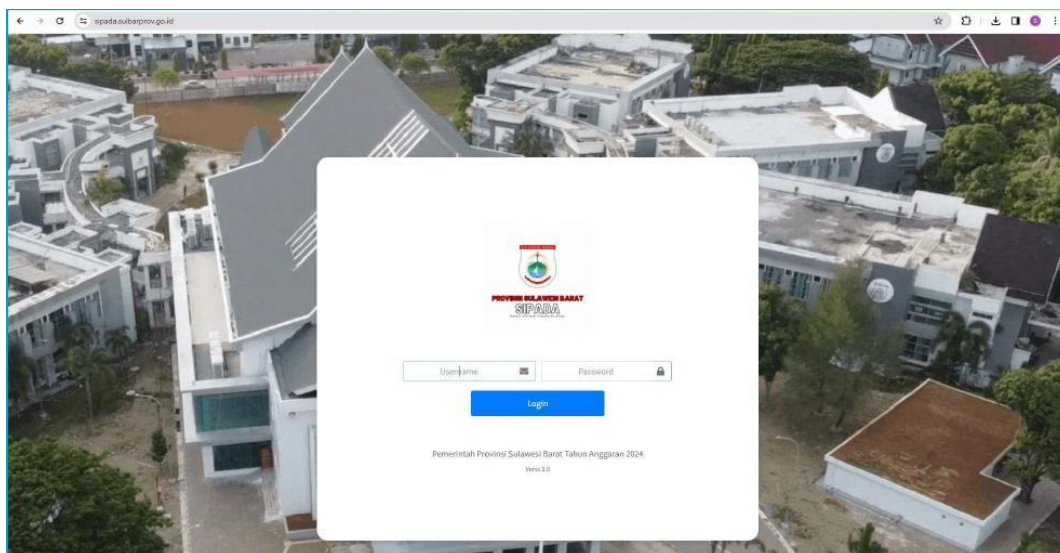
akan membuat semua pekerjaan lebih cepat dan pelayanan kepada masyarakat akan berjalan maksimal

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia ,dengan produktivitas pekerjaan yang berjalan lancar akan membuat kita lebih mudah untuk berkonsentrasi dan memperhatikan dokumen dan data pekerjaan yang dihasilkan daripada memasukkan data satu persatu secara manual yang memerlukan proses dan waktu belum lagi menghadapi prosedur hukum yang memerlukan paraf berjenjang
4. User interface seragam dan konsisten,dengan kesamaan user interface akan menghasilkan format data yang sama tidak berubah dan bisa diakses dimana saja tanpa kehilangan waktu
5. Menghemat biaya dan ruang penyimpanan,seperti penggunaan kertas menghemat penggunaan penyimpanan data computer
6. Semua dokumen persuratan terdokumentasi dengan baik
7. Data dan informasi terpusat,data base sudah tertata rapi dan jika memerlukan pembuatan laporan akan memudahkan dalam mencari data lebih cepat
8. Menekan resiko pencurian data,karena ketika terjadi kebocoran akan lebih mudah melacak sumber terjadinya peristiwa tersebut
9. Proses pengambilan keputusan lebih mudah untuk dilakukan
10. Mempercepat pelayanan kepada Masyarakat.

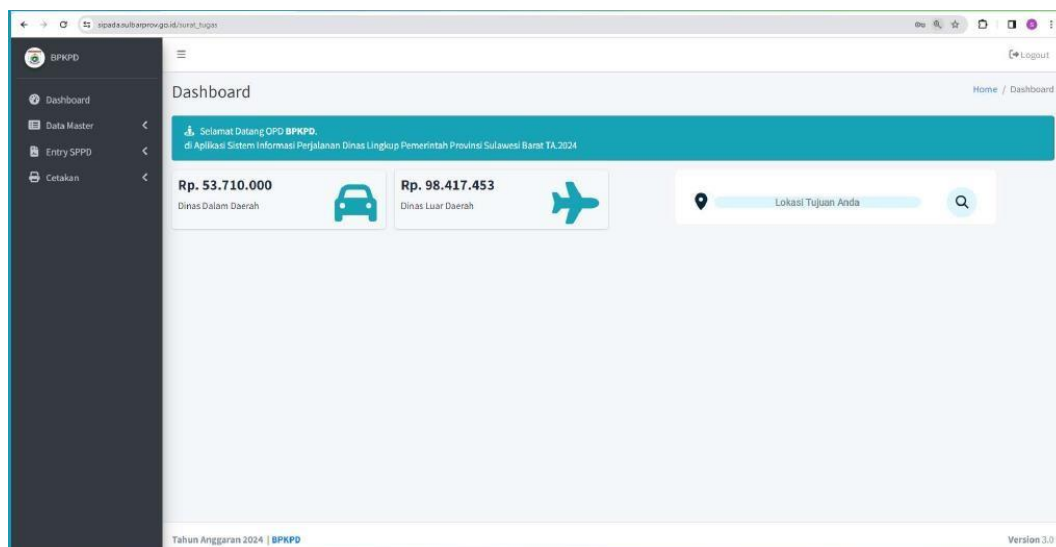
2.3. Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SIPADA)

SIPADA (Sistem Informasi Perjalanan Dinas) adalah sistem yang dirancang untuk mengelola perjalanan dinas pegawai negeri secara elektronik, dari proses pengajuan hingga pelaporan. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses perjalanan dinas, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas. Menurut Putra (2019), SIPADA mampu mengintegrasikan seluruh proses administratif perjalanan dinas mulai dari pengajuan, verifikasi, hingga pembayaran biaya perjalanan secara lebih efisien.

Berikut tampilan aplikasi Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SIPADA) yang digunakan oleh biro umum setda provinsi Sulawesi barat:



Gambar 2.3. Halaman Login SIPADA



Gambar 2.4. Halaman Utama SIPADA

Beberapa manfaat SIPADA di lingkungan pemerintahan antara lain:

- a. Mempercepat proses pengajuan perjalanan dinas.
- b. Mengurangi kesalahan dalam pencatatan data perjalanan dinas.
- c. Meningkatkan akurasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran perjalanan.
- d. Memudahkan proses pelaporan perjalanan dinas secara real-time.

Aplikasi SIPADA adalah Sistem Informasi Perjalanan Dinas merupakan aplikasi yang digunakan oleh Pemprov Sulbar Sulawesi Barat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan perjalanan dinas

Tujuan dan manfaat SIPADA antara lain:

1. meningkatkan efisiensi dalam proses pengajuan perjalanan dinas dan memudahkan pembuatan dan pengelolaan Perjalanan dinas

2. ketertiban administrasi, Sipada dapat menyimpan data perjalanan dinas secara terpusat dan mudah untuk di akses
3. pengurangan pekerjaan manual, mengurangi penggunaan kertas dan dokumen manual, meminimalkan kesalahan manusia dalam pengisian data manual meminimalkan kesalahan manusia dalam pengisian data dan proses pembuatan surat tugas dan SPJ kwitansi
4. peningkatan akurasi data
5. mengurangi resiko kesalahan input yang mungkin terjadi pada proses manual dan menyediakan otomatisasi validasi data untuk memastikan keakuratan informasi
6. memudahkan pelaporan, memungkinkan pembuatan laporan perjalanan dinas dengan cepat dan akurat serta mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk Menyusun laporan secara manual
7. keamanan data, Sipada menyediakan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi dan informasi serta memastikan bahwa informasi perjalanan dinas hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

2.4. Kinerja Organisasi

Menurut Robbins dan Judge (2017), kinerja organisasi merupakan hasil dari aktivitas yang dilakukan oleh seluruh komponen dalam suatu organisasi. Kinerja organisasi dapat diukur melalui pencapaian tujuan, kualitas pelayanan, efisiensi operasional, dan produktivitas kerja. Dalam organisasi pemerintahan, kinerja menjadi ukuran penting dalam

menentukan keberhasilan suatu instansi dalam melaksanakan fungsinya melayani masyarakat.

Indikator kinerja organisasi menurut Kaplan dan Norton (1996) dalam kerangka Balanced Scorecard meliputi empat perspektif:

- a. **Perspektif Keuangan:** Mengukur sejauh mana instansi mampu mengelola anggaran secara efisien.
- b. **Perspektif Pelanggan:** Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
- c. **Perspektif Proses Internal:** Mengukur efisiensi proses-proses internal dalam organisasi.
- d. **Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan:** Mengukur kemampuan organisasi dalam berinovasi dan meningkatkan kualitas SDM.

Penerapan sistem informasi seperti SRIKANDI dan SIPADA dapat berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi, terutama dalam aspek efisiensi proses internal dan manajemen sumber daya yang lebih baik.

2.5. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kinerja Organisasi

Teknologi informasi telah terbukti mampu memberikan dampak signifikan terhadap kinerja organisasi. Menurut Laudon dan Laudon (2018), teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, mempercepat waktu pengolahan data, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Di lingkungan pemerintahan, penerapan teknologi informasi mendukung transformasi menuju e-government, di

mana pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Teknologi informasi juga dapat membantu organisasi untuk merespons perubahan dengan lebih cepat, menyediakan data yang lebih akurat, dan mendorong inovasi dalam layanan publik. Penerapan sistem informasi terintegrasi seperti SRIKANDI dan SIPADA mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.